

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2018



<https://sawahlunto.go.id>



**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
KOTA SAWAHLUNTO  
2018**



# **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SAWAHLUNTO 2018**

**ISBN** : 978-602-1394-63-2

**No. Publikasi** : 13730.1912

**Katalog** : 4102004.1373

**Ukuran Buku** : 17,6 cm x 25 cm

**Jumlah Halaman** : xii + 67 halaman

**Penyusun Naskah** :

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

**Penyunting** :

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

**Ilustrasi Cover** :

Museum Gudang Ransoem Sawahlunto

**Desain Cover** :

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

**Diterbitkan Oleh** :

© Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

**Dicetak Oleh** :

CV Demy (cetakan : I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto (UU No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta Pasal 43 huruf b).

## KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sawahlunto 2018 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Sawahlunto antar waktu. Data yang digunakan bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut delapan bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Sawahlunto, Desember 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kota Sawahlunto



**HENDRO SEPRITA DEZA, SST**



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
Singkatan dan Akronim .....	xi
Bab I Kependudukan .....	1
Bab II Kesehatan dan Gizi .....	13
Bab III Pendidikan .....	21
Bab IV Ketenagakerjaan .....	31
Bab V Taraf dan Pola Konsumsi .....	39
Bab VI Perumahan dan Lingkungan .....	47
Bab VII Kemiskinan .....	55
Bab VIII Sosial Lainnya .....	61



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto, 2016-2018 .....	3
Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2018 .....	4
Tabel 1.3 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2018 .....	6
Tabel 1.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen), 2014-2018.....	7
Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB Atau Cara Tradisional Untuk Menunda Atau Mencegah Kehamilan, 2017-2018 .....	11
Tabel 2.1 Angka Kesakitan Kota Sawahlunto (Persen) 2017-2018.....	16
Tabel 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan, 2017-2018 .....	18
Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat (Persen), 2017-2018 .....	18
Tabel 2.5 Penduduk yang menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen), 2018 .....	20
Tabel 3.1 Angka Melek Huruf dan rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2017-2018.....	24
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni .....	27
Tabel 3.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen) Kota Sawahlunto, 2018.....	28
Tabel 4.1 Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2017-2018.....	34

Tabel 4.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2018 .....	36
Tabel 4.3	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha (Persen), 2018 .....	37
Tabel 5.1	Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan, 2017-2018 .....	42
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2018.....	43
Tabel 5.3	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Golongan Pengeluaran, 2017-2018 .....	45
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan Kota Sawahlunto, 2017-2018.....	50
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kota Sawahlunto, 2017-2018.....	52
Tabel 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin, 2015-2018.....	58
Tabel 7.2	Beberapa Indikator Penduduk Miskin, 2016-2018.....	58
Tabel 8.1	Indikator Sosial Lainnya, 2017-2018.....	63
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi, 2017-2018.	66

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Persen), 2018.....	5
Gambar 1.2	Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sawahlunto, 2014-2018.....	8
Gambar 1.3	Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen), 2017-2018.....	10
Gambar 1.4	Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2017-2018.....	12
Gambar 2.1	Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto, 2014-2018.....	16
Gambar 3.1	Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018.....	25
Gambar 4.1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha, 2017-2018.....	38
Gambar 5.1	Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto, 2014-2018 .....	44
Gambar 6.1	Status Kepemilikan Rumah (Persen), 2018.....	53



## SINGKATAN DAN AKRONIM

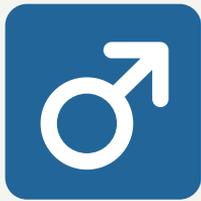
APM	Angka Partisipasi Murni
APS	Angka Partisipasi Sekolah
ASI	Air Susu Ibu
ASFR	<i>Age specifik Fertility Rate</i>
BPS	Badan Pusat Statistik
KB	Keluarga Berencana
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SP	Sensus Penduduk
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>SDGs</i>	<i>Sustainable Development Goals</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
AMH	Angka Melek Huruf
APK	Angka Partisipasi Kasar
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
TSP	Tingkat Setengah Pengangguran
GK	Garis Kemiskinan
ART	Anggota Rumah Tangga
KRT	Kepala Rumah Tangga



Bab 1

# KEPENDUDUKAN

## JUMLAH PENDUDUK KOTA SAWAHLUNTO



30.820

+



31.078



61.898



Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2018 adalah 61.898 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2017 (61.398 jiwa), dengan laju pertumbuhan 0,81 persen per tahun.





## KEPENDUDUKAN

### Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto pada tahun 2018 adalah 61.898 jiwa meningkat dibandingkan tahun 2017 (61.398 jiwa) dengan laju pertumbuhan 0,81 persen per tahun. Laju pertumbuhan menunjukkan angka positif serta menunjukkan kecenderungan menurun yaitu dari 1,02 persen di tahun 2017 menjadi 0,81 persen di tahun 2018.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto, 2016-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Laju Pertumbuhan Penduduk</b>
(1)	(2)	(3)
2016	<b>60 778</b>	-
2017	<b>61 398</b>	<b>1.02</b>
2018	<b>61 898</b>	<b>0,81</b>

*Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010*

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin.

Penduduk Kota Sawahlunto lebih didominasi oleh penduduk wanita dengan rasio jenis kelamin penduduk di tahun 2018 adalah sebesar 99,17 artinya secara rata-rata dalam setiap seratus orang penduduk wanita akan terdapat 99 penduduk laki-laki.

**Tabel 1.2 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2018**

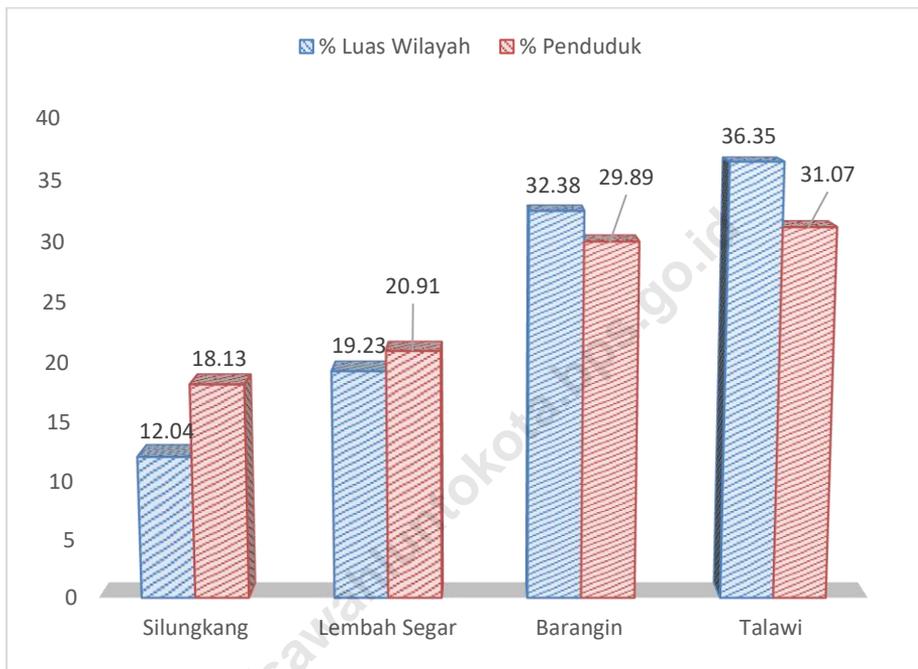
Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis
	Laki- laki	Wanita	Jumlah	Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Silungkang	5 634	5 587	11 221	100,84
Lembah Segar	6 301	6 642	12 943	94,87
Barangin	9 171	9 331	18 502	98,29
Talawi	9 714	9 518	19 232	102,06
<b>Kota Sawahlunto</b>	<b>30 820</b>	<b>31 078</b>	<b>61 898</b>	<b>99,17</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

### Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu permasalahan yang dihadapi dengan meningkatnya jumlah penduduk yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata sehingga berdampak pada kepadatan penduduk yang semakin bertambah. Konsentrasi penduduk yang tinggi pada suatu wilayah di satu sisi dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas lingkungan dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto pada tahun 2018 secara rata-rata kepadatan 226,36 per jiwa per kilo meter persegi.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Persentase Luas Wilayah dan Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Persen), 2018**



Sumber: DDA, 2018

Kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto belum merata. Beberapa kecamatan dengan luas wilayah yang besar, jumlah penduduknya cukup rendah seperti Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar berada dalam kondisi yang sebaliknya, dengan luas wilayah yang paling kecil kepadatan penduduknya melebihi dari luas wilayah. Hal ini disebabkan Kecamatan Silungkang merupakan jalur lintas Sumatera dan Kecamatan Lembah Segar merupakan ibukota Sawahlunto dan merupakan pusat pemukiman dan perekonomian.

**Tabel 1.3 Jumlah, Persebaran, dan Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto Menurut Kecamatan, 2018**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Persebaran Penduduk</b>	<b>Kepadatan penduduk</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Silungkang	11 221	18,13	340,75
Lembah Segar	12 943	20,91	246,16
Barangin	18 502	29,89	208,94
Talawi	19 232	31,07	193,50
<b>Kota Sawahlunto</b>	<b>61 898</b>	<b>100,00</b>	<b>226,36</b>

*Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010*

Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Silungkang, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lembah Segar. Silungkang merupakan daerah perlintasan antar kabupaten/kota, sedangkan Lembah Segar merupakan pusat ibu kota juga memiliki berbagai macam fasilitas dan merupakan wilayah ibu kota/perekonomian kota. Selanjutnya, kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Talawi. Terlihat adanya kecenderungan penduduk perkotaan kepadatan penduduk relatif lebih tinggi, sedangkan daerah perdesaan kepadatan penduduk lebih rendah.

### **Angka Beban Ketergantungan**

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan banyak hal diantaranya tingkat produktivitas penduduk serta tingkat konsumsi penduduk. Dilihat dari sisi konsumsi, penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan. Dari sisi produktivitas,

penduduk pada kelompok umur tersebut masih rendah, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Begitu pula dengan penduduk yang ada pada kelompok umur diatas 65 tahun, dengan produktifitas yang secara umum mulai menurun, mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Sebaliknya untuk penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun yang produktivitasnya secara rata-rata akan lebih tinggi dibandingkan konsumsinya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini relatif terhadap kelompok umur lainnya, berpeluang untuk meningkatkan produktivitas di suatu wilayah.

**Tabel 1.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Rasio Ketergantungan (persen), 2014-2018**

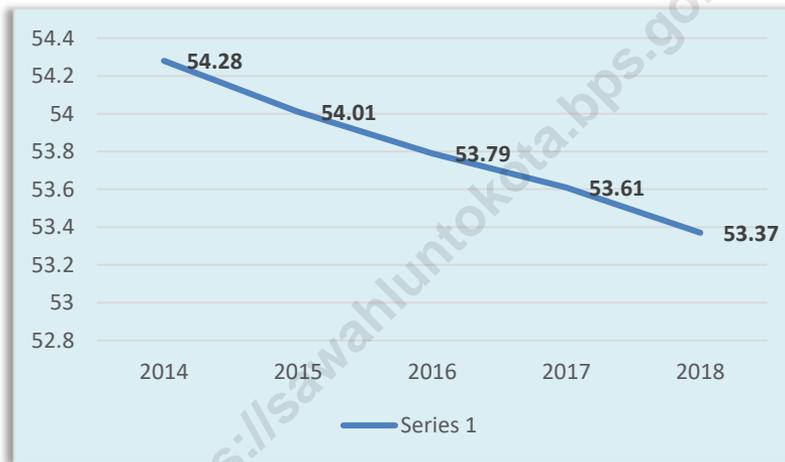
Tahun	Kelompok Umur (Tahun)			Rasio Ketergantungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2014	29,02	64,82	6,16	54,28
2015	28,82	64,93	6,25	54,01
2016	26,63	65,02	6,35	53,79
2017	28,40	65,10	6,50	53,61
2018	28,58	65,44	5,98	53,37

Sumber: Proyeksi Penduduk SP2010

Proporsi penduduk umur produktif di Kota Sawahlunto adalah yang terbesar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 komposisi penduduk usia produktif sebesar 64,82 persen menjadi 65,44 persen di tahun 2018. Sementara komposisi usia 0-14 tahun menurun 29,02 persen menjadi 28,58 persen. Sedangkan pada komposisi penduduk usia 65 tahun keatas mengalami penurunan dari 6,16 persen menjadi 5,98 persen. Hal

tersebut menyebabkan angka beban ketergantungan penduduk Kota Sawahlunto terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2014 angka beban ketergantungan sebesar 54,28 persen dan menurun menjadi 53,37 persen pada tahun 2018.

**Gambar 1.2 Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk Kota Sawahlunto, 2014-2018**



Angka beban ketergantungan pada tahun 2018 sebesar 53,37 berarti setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 53 orang penduduk tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia. Menurunnya angka beban ketergantungan juga dapat menggambarkan bahwa jumlah penduduk produktif yang semakin meningkat relatif terhadap jumlah penduduk yang tidak produktif. Jika kecenderungan penurunan angka beban ketergantungan terus berlangsung, maka diharapkan Indonesia akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (*windows of opportunity*).

Angka beban ketergantungan juga dapat menunjukkan tanda-tanda adanya bonus demografi yaitu angka ketergantungan di bawah 50 yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang

penduduk produktif. Seperti diketahui bahwa bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja 15-64 tahun, dimana penduduk pada kelompok ini menjadi potensial bagi Indonesia untuk menjadi negara maju apabila sumber daya manusianya berkualitas. Sebaliknya, akan menjadi bumerang jika kualitas sumber daya manusia penduduk produktif itu rendah (Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2011-2035).

## **Perkawinan**

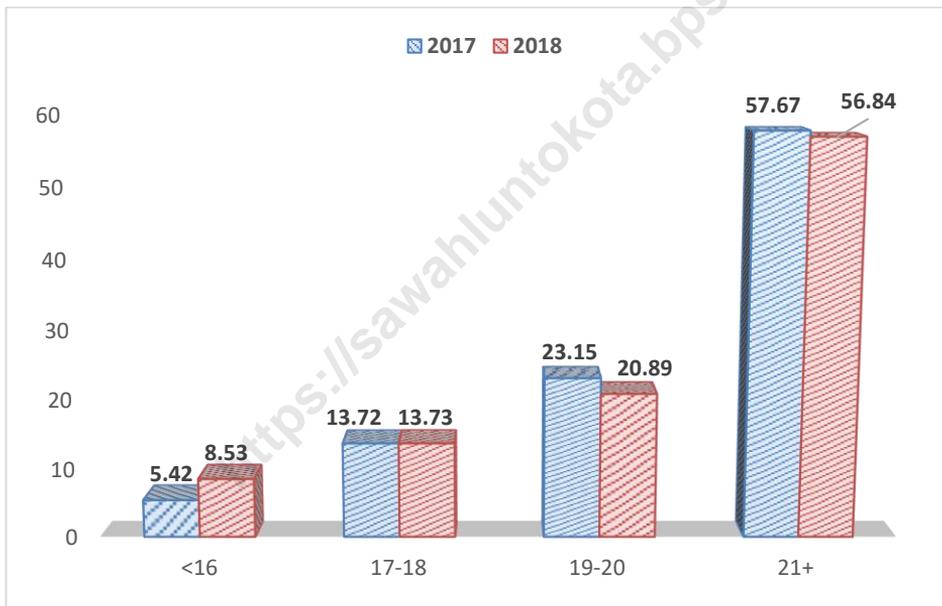
Salah satu yang dapat memicu pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran yang terjadi pada seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama maka akan semakin panjang masa reproduksinya.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, persentase wanita Kota Sawahlunto berusia < 16 tahun yang melakukan perkawinan pertamanya sebesar 8,53 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 5,42 persen. Sebagian besar wanita melakukan perkawinan pertama pada usia 21 tahun ke atas dan persentasenya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 57,67 persen pada tahun 2017 turun menjadi 56,84 persen pada tahun 2018. Sementara itu, wanita yang melakukan

perkawinan pertama pada usia 17-18 tahun hamper sama dengan tahun sebelumnya yaitu dari 13,72 persen pada tahun 2017 menjadi 13,73 persen pada tahun 2018, untuk rentang usia 19-20 tahun mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 mencapai 23,15 persen di tahun 2017 turun menjadi 20,89 persen.

**Gambar 1.3 Wanita Pernah Kawin Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Umur Perkawinan Pertama (persen), 2017-2018**



Sumber: DDA, 2017-2018

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat. Terutama untuk kepesertaan KB dengan metode

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan Implant. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2017-2018, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sebesar 11,25 persen pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 44,12 persen pada tahun 2018. Grafik memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil yang paling banyak diminati.

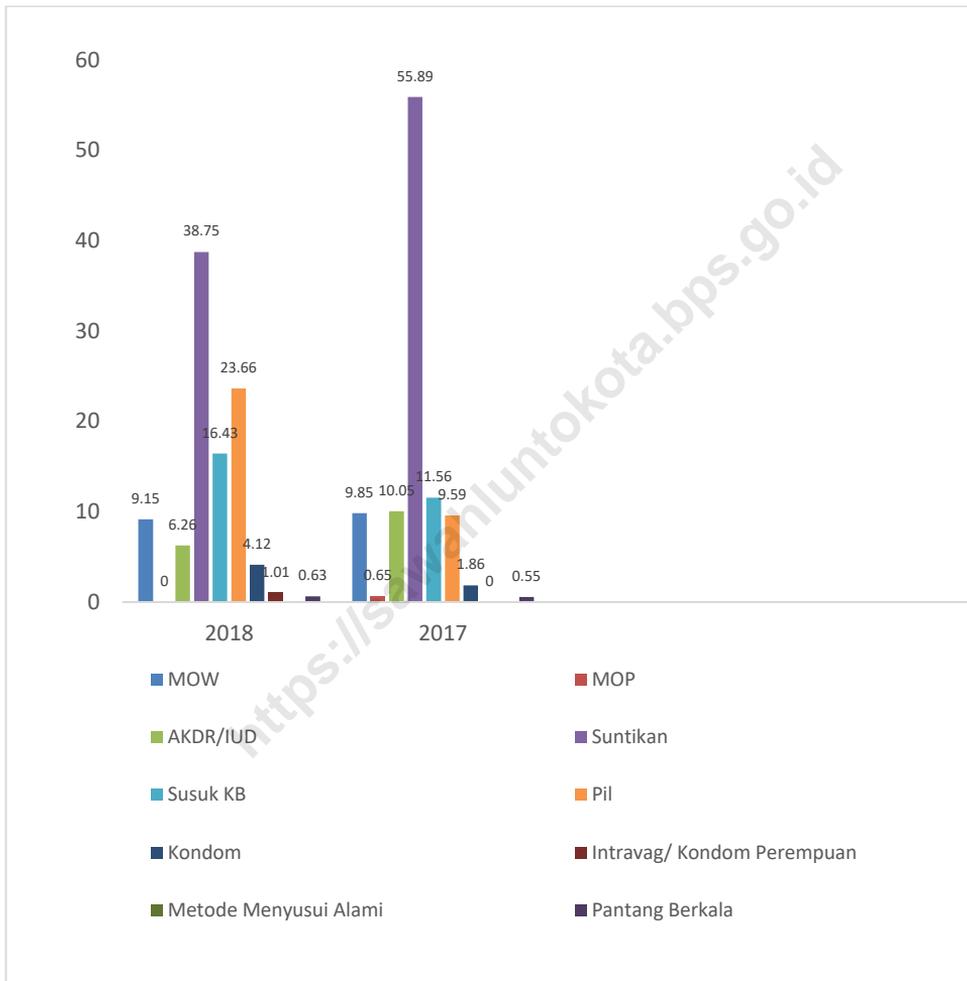
**Tabel 1.5 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Kawin dan Pernah/Sedang Menggunakan Alat KB Atau Cara Tradisional Untuk Menunda Atau Mencegah Kehamilan, 2017-2018**

Pernah/Tidak Memakai Alat KB	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Pernah	27,21	13,49
Sedang	11,25	44,12
Tidak pernah menggunakan	61,54	42,39

*Sumber: Susenas, 2017-2018*

Pada tahun 2017 penggunaan suntikan mencapai 55,89 persen dan menurun menjadi 38,75 persen pada tahun 2018, sedangkan penggunaan pil mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 9,59 persen pada tahun 2017 menjadi 23,66 persen pada tahun 2018. Pemakaian AKDR dan MOW mengalami penurunan yaitu 10,06 dan 9,85 persen di tahun 2017 menurun menjadi 6,26, 9,15 persen di tahun 2018. Pemakaian susuk KB mengalami kenaikan dari 9,59 persen di tahun 2017 menjadi 16,43 persen di tahun 2018. Sementara pemakaian MOP/Vasektomi, Kondom/karet, dan Intravag/tissue/kondom wanita hanya berada di bawah lima persen.

**Gambar 1.4 Persentase Perempuan Berumur 15 - 49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Kabupaten/Kota dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2017-2018**



Sumber: Susenas 2017, 2018

## Bab 2

# KESEHATAN DAN GIZI



**ANGKA KESAKITAN = 9,80%**



**UMUR HARAPAN  
HIDUP = 69,59 TAHUN**



**Secara rata-rata bayi yang  
dilahirkan pada tahun 2018  
dapat hidup selama 69,59 tahun**





## KESEHATAN DAN GIZI

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah semakin baik. Pada akhirnya hasil dari kegiatan perekonomian adalah tingkat produktivitas penduduk suatu wilayah dapat diwujudkan. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik, seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan tingkat angka kesakitan masyarakat, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, menurunkan Prevalensi Gizi Buruk dan Gizi Kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

### **Derajat dan Status Kesehatan Penduduk**

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, maka Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

**Tabel 2.1 Angka Kesakitan Kota Sawahlunto (Persen), 2017-2018**

Tahun	Angka Kesakitan
(1)	(2)
2017	12,82
2018	9,80

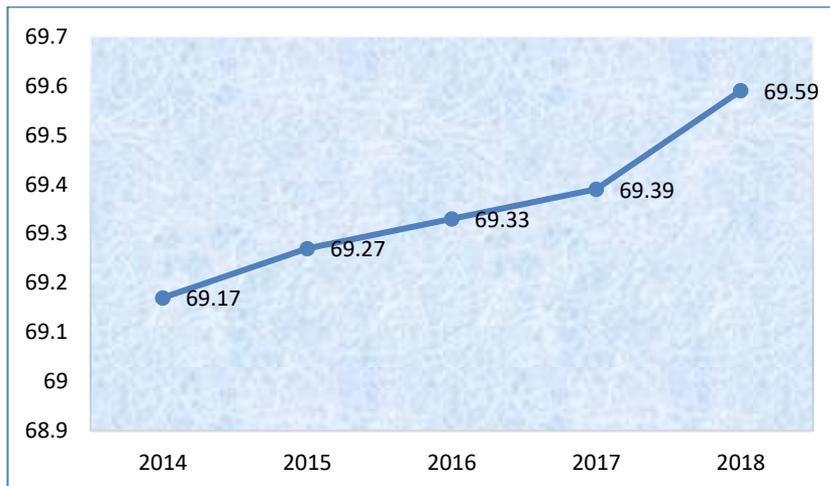
*Sumber: Susenas, 2017-2018*

Hasil Susenas tahun 2018 menunjukkan angka kesakitan penduduk Kota Sawahlunto mencapai 9,80 persen, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 12,82 persen.

### Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup penduduk Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dari 69,17 di tahun 2014 menjadi 69,59 di tahun 2018. Ini berarti bahwa secara rata-rata bayi yang dilahirkan pada tahun 2018 dapat hidup selama 69,59 tahun. Meningkatnya angka harapan hidup penduduk mengindikasikan semakin baiknya taraf kesehatan penduduk.

**Gambar 2.1 Umur Harapan Hidup Kota Sawahlunto, 2014-2018**



*Sumber: Susenas 2018*

## **Pemanfaatan Fasilitas dan Tenaga Kesehatan**

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya. Seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa, seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 telah ditetapkan dalam Perpres No. 5 tahun 2010 yaitu meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.

Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan sudah mencapai 100 persen artinya hampir tidak ditemukan penolong persalinan tenaga dukun bayi di Kota Sawahlunto.

Peningkatan perubahan sikap masyarakat yang lebih baik tersebut ditandai dengan banyaknya penduduk yang melakukan persalinan ke bidan pada tahun 2017 sebesar 51,28 persen turun menjadi 43,11 persen di tahun 2018 dan begitu juga dengan persalinan ke dokter meningkat dari 48,72 persen di tahun 2017 menjadi 56,89 persen di tahun 2018.

**Tabel 2.2 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan, 2017-2018**

Indikator	2016	2017
(1)	(2)	(3)
<b>Persentase balita menurut penolong persalinan</b>		
<b><u>Tenaga Kesehatan</u></b>		
Dokter	48,72	56,89
Bidan	51,28	43,11
Lainnya	0,00	0,00
Bukan Tenaga Kesehatan	0,00	0,00
Dukun Tradisional	0,00	0,00
Lainnya	0,00	0,00

Sumber: Susenas, 2017-2018

**Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat (Persen), 2017-2018**

Indikator	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Rumah Sakit Pemerintah	11,52	11,06
Rumah Sakit Swasta	0,00	0,00
Praktek Dokter/Bidan	41,71	30,52
Klinik/Praktek Dokter Bersama	1,68	3,22
Puskesmas/Pustu	43,09	61,46
UKBM*	4,07	1,01
Praktek Pengobatan Tradisional	6,08	0,40
Dukun Bersalin/Lainnya	0,00	0,35

Sumber: Susenas, 2017

Dari tabel 2.3 terlihat adanya penurunan persentase penduduk yang berobat jalan ke Rumah Sakit Pemerintah, Praktek Dokter/Bidan, UKBM dan Praktek Pengobatan Tradisional yaitu dari 11,52 persen, 41,71 persen, 4,07 persen dan 6,08 persen di tahun 2017 menjadi 11,06 persen, 30,52 persen, 1,01 persen dan 0,40 persen pada tahun 2018. Sedangkan penduduk yang memanfaatkan berobat ke Klinik/Praktek Dokter Bersama, Puskesmas/Pustu dan Dukun Bersalin/Lainnya meningkat dari 1,68 persen, 43,09 persen dan 0,00 persen di tahun 2017 menjadi 3,22 persen, 61,46 persen dan 0,35 persen.

Secara menyeluruh kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/ tidak terlatih/ tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi social ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Pemilikan jaminan kesehatan sangat diperlukan agar penduduk tidak mengalami kendala dalam mengakses fasilitas kesehatan, terutama kendala yang berkaitan dengan kendala biaya. Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM). Program ini bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat Kota Sawahlunto. Pelaksanaan program JPKM telah dimulai sejak tahun 2003 dan sampai tahun 2012. Namun tidak semua masyarakat Kota Sawahlunto yang memanfaatkan jaminan kesehatan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat di tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan (Persen), 2018**

Indikator	2018
(1)	(2)
BPJS Kesehatan PBI	23,03
BPJS Kesehatan Non PBI	21,69
Jamkesda	7,32
Asuransi Swasta	0,00
Perusahaan/Kantor	2,94

*Sumber: Susenas, 2018*

Dari tabel 2.4 terlihat bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan jaminan kesehatan 54,98 persen di tahun 2018. Hal ini juga dipengaruhi oleh adanya layanan Jamkesda Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang disebut dengan JKSS (Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang) yang membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan berobat jalan ke tempat pelayanan kesehatan medis.

# Bab 3

# PENDIDIKAN



**RATA-RATA LAMA SEKOLAH =  
9,94 TAHUN**

## ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH



**7 - 12 TAHUN = 100,00%**

**13 - 15 TAHUN = 98,90%**

**16 - 18 TAHUN = 83,02%**





## PENDIDIKAN

Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan. Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Dalam beberapa tahun ke depan pembangunan pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, terutama dalam upaya meningkatkan kinerja yang mencakup :

1. Pemerataan dan perluasan akses,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing,
3. Penataan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik,
4. Peningkatan pembiayaan.

Beberapa indikator output yang dapat menunjukkan kualitas pendidikan SDM antara lain Angka Melek Huruf (AMH), Tingkat Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator input pendidikan salah satunya adalah fasilitas pendidikan.

### **Kemampuan Baca Tulis dan Rata-rata Lama Sekolah**

Kegiatan membaca merupakan proses awal memasuki dunia pengetahuan yang begitu luas menuju masyarakat maju. Membaca akan mempermudah seseorang untuk memahami informasi terkait bidang kerja dan berbagai aspek yang menyangkut peningkatan kualitas hidup. Kemampuan

baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuan hidupnya. Hal ini berkaitan langsung dengan bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Salah satu indikator mendasar yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan membaca dan menulis adalah angka melek huruf (*literacy rate*). Kata “melek huruf” dapat diartikan sebagai kemampuan untuk dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain atau dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca tulis. AMH merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan bidang pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia suatu daerah.

**Tabel 3.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Angka Partisipasi Kasar, 2017-2018**

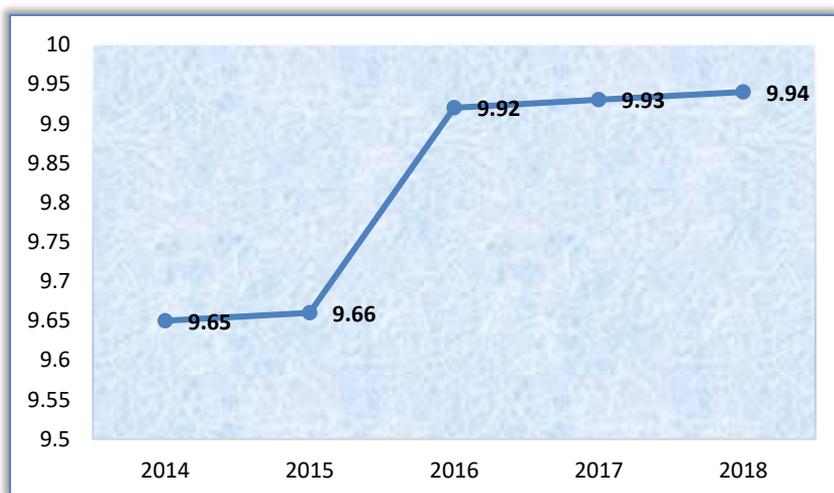
Indikator	2017	2018
(1)	(2)	(3)
<b>Kemampuan Baca Tulis</b>		
Huruf Latin	99,36	98,35
Huruf Arab	13,15	5,63
Huruf Lainnya	0,22	0,08
Buta Huruf	0,32	0,91
<b>Angka Partisipasi Kasar</b>		
7-12	105,93	111,33
13-15	95,21	96,68
16-18	100,20	88,85

Angka melek huruf dirasakan sudah jenuh untuk menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk. Jika ada penduduk yang buta huruf pada umumnya berasal dari kelompok umur tua, sehingga sulit untuk mengupayakan agar penduduk tersebut dapat membaca atau menulis. Oleh karena itu diperlukan indikator lainnya yang menggambarkan perkembangan tingkat pendidikan penduduk seperti rata-rata lama sekolah atau angka partisipasi sekolah.

Rata-rata lama sekolah merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Peningkatan rata-rata lama sekolah mengindikasikan perbaikan tingkat pendidikan penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sawahlunto secara umum cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga tahun 2018. Pada tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Sawahlunto adalah 9,93 tahun yang setara dengan kelas tiga SMP. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Sawahlunto adalah sekitar 9,94 tahun .

**Gambar 3.1 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2014-2018**



## Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni

Salah satu tujuan dari *Millenium Development Goals (MDGs)* adalah menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015 semua anak, baik laki-laki maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar (*primary schooling*). Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk menilai pencapaian MDGs yaitu melihat akses pendidikan pada penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang mempunyai kesempatan untuk mengenyam pendidikan, namun bukan berarti meningkatnya APS juga meningkatkan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan.

Penduduk usia 7-12 tahun yang sudah mengenyam bangku pendidikan dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami fluktuasi, dimana tahun 2018 sudah mencapai 100,00 persen. Adapun pada kelompok usia berikutnya APS semakin menurun. Pada usia 13-15 APS sebesar 98,90 persen atau masih terdapat 1,10 persen penduduk usia 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan, data ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 98,83 persen. Untuk usia 16-18 tahun APS hanya sebesar 83,02 persen, atau terdapat sebesar 16,98 persen penduduk usia 16 – 18 tahun di Kota Sawahlunto belum pernah sekolah. Dari data ini terjadi penurunan angka APS di kelompok SLTA dari tahun 2016 sampai 2018.

Pada Tabel 3.2 dapat dilihat angka APM dari tahun 2016-2018 penduduk pada kelompok umur SD mengalami fluktuasi, sedangkan pada kelompok umur SLTP dan SLTA angka APM cenderung menurun.

**Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni, 2016-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>			
<b>7 – 12 tahun</b>	100	99,70	100,00
<b>13 – 15 tahun</b>	100	98,83	98,90
<b>16 – 18 tahun</b>	86,32	84,42	83,02
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>			
<b>SD</b>	100	99,70	100,00
<b>SLTP</b>	100	86,83	83,73
<b>SLTA</b>	87,04	72,26	71,56

Sumber: Susenas, 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan persentase jumlah anak yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Secara umum, semakin tinggi tingkat pendidikan, APM semakin menurun. Hal ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya partisipasi penduduk dalam melanjutkan jenjang pendidikannya.

Secara umum APM SD sudah mencapai 100 persen, yang artinya seluruh penduduk yang berusia 7-12 sedang mengenyam bangku Sekolah Dasar. Seperti halnya APS, semakin tinggi jenjang pendidikan APM juga semakin menurun. APM tingkat SMP sebesar 83,73 persen, menunjukkan penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMP sebesar 83,73 persen, dan APM tingkat SMA sebesar 71,56 persen.

## Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tingkat kesejahteraan penduduk diharapkan semakin baik. Penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP berpeluang memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan penduduk yang berpendidikan SD atau dibawahnya. Persentase penduduk dengan tingkat pendidikan setara SMP mencapai 20,12 persen. Berdasarkan jenis kelamin terlihat bahwa persentase penduduk perempuan yang minimal menamatkan tingkat pendidikan setara SMP lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

**Tabel 3.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen) Kota Sawahlunto, 2018**

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki	Wanita	Laki-laki + Wanita
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Mempunyai Ijazah	12,54	16,37	14,48
Tamat SD Sederajat	26,51	17,84	22,12
Tamat SMP Sederajat	19,66	20,56	20,12
Tamat SMA Sederajat	22,93	22,99	22,96
SMK	10,27	7,07	8,65
Dipoma I dan II	0,76	1,11	0,94
Diploma III	0,99	3,53	2,27
Diploma IV/S1/S2/S3	6,33	10,53	8,46
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas, 2018

Dilihat menurut pendidikan tertinggi yang pernah di tamatkan, sebagian besar penduduk Kota Sawahlunto memiliki pendidikan setara SMP sederajat dengan persentase mencapai 20,12 persen. Persentase penduduk yang menamatkan perguruan tinggi masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 8,46

persen. Penduduk yang tidak memiliki ijazah masih tergolong tinggi yaitu sebesar 14,48 persen.

Jika dibanding menurut jenis kelamin terlihat persentase penduduk laki-laki yang memiliki ijazah tertinggi SD dan SMK lebih tinggi daripada perempuan, namun memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Diploma ke atas) persentase perempuan yang memilikinya lebih besar dibandingkan laki-laki.

<https://sawahluntokota.bps.go.id>



## Bab 4

# KETENAGAKERJAAN

**TINGKAT PARTISIPASI  
ANGKATAN KERJA = 72,63%**



**TINGKAT PENGANGGURAN  
TERBUKA = 5,75%**



Menurunnya tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia cukup mampu menyerap jumlah tenaga kerja





## KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah, dimana masalah ketenagakerjaan ini merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Berbagai masalah bidang ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah antara lain tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Beberapa indikator yang menggambarkan ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan usaha, persentase pekerja menurut kelompok upah/gaji/pendapatan bersih dan persentase pekerja anak.

### **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPAK merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. Partisipasi angkatan kerja juga dapat diukur dengan TPAK yang berguna untuk mengetahui besarnya persentase penduduk usia kerja yang berpotensi untuk aktif secara ekonomi di suatu negara. Nilai TPAK yang terus meningkat menandakan bahwa

ketersediaan penduduk usia kerja yang dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi (*labour supply*) semakin banyak.

TPAK mengalami peningkatan dari 70,44 persen pada 2017 menjadi 72,63 persen pada 2018 kondisi Agustus. Peningkatan TPAK ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk ekonomi aktif untuk mencari atau melakukan kegiatan ekonomi. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini disebabkan penduduk perempuan keluar dari angkatan kerja disebabkan mengurus rumah tangga.

**Tabel 4.1 Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen), 2017-2018**

Uraian	2017	2018
(1)	(2)	(3)
<b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</b>		
Laki-laki	82,10	82,97
Perempuan	59,12	62,61
Laki-laki+Perempuan	70,44	72,63
<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
Laki-laki	5,96	6,37
Perempuan	6,51	4,96
Laki-laki+Perempuan	6,19	5,75

*Sumber: Sakernas 2017 dan 2018*

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 sebesar 5,75 persen terlihat lebih rendah jika di tahun 2017 (6,19 persen). Menurunnya TPT tahun 2018 menunjukkan bahwa lapangan kerja yang tersedia cukup mampu menyerap

jumlah tenaga kerja. Hal ini terkait dengan tersedianya jumlah lapangan kerja dan meningkatnya kecenderungan penyerapan tenaga kerja.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan**

Harapan setiap individu adalah mudah mendapatkan pekerjaan layak, sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada makin tinggi harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Namun karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Tidak sedikit juga dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ditamatkan, sehingga sebagian dari mereka banyak yang menjadi pengangguran.

Secara umum pada tabel 4.2 tampak bahwa persentase penduduk yang menganggur paling besar pada jenjang pendidikan SMA dan SMK. Pemerintah masih harus membuat terobosan untuk menekan bertambahnya jumlah pengangguran terdidik terutama dalam bidang kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan penduduk terdidik Kota Sawahlunto yang dirasa masih cukup lemah.

**Tabel 4.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan, 2018**

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	NA	NA	NA
SD/MI	292	NA	292
SMP/Tsanawiyah	272	NA	272
SMA/Aliyah	148	288	436
SMK	351	212	563
Diploma I/II/III	NA	132	132
Universitas/S1/S2/S3	89	67	156
<b>Total</b>	<b>1 152</b>	<b>699</b>	<b>1 851</b>

\*NA = data tidak dapat ditampilkan

Sumber: Sakernas, 2018

### Lapangan Usaha

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 5 kategori lapangan usaha, yaitu 1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, 2. Industri pengolahan, 3. Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel, 4. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan, 5. Lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan, komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan).

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Kategori Lapangan Usaha (Persen), 2018**

Kode Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	18,78	13,53	16,46
2	6,73	23,07	13,94
3	15,05	22,71	18,43
4	15,54	34,25	23,80
5	43,91	6,45	27,37
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas 2018

Secara umum penduduk Kota Sawahlunto yang bekerja mayoritas berada pada kelompok kategori lapangan usaha lainnya sebesar 27,37 persen, diikuti jasa (23,80 persen), kemudian perdagangan (18,43 persen). Jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang bekerja di sektor jasa, perdagangan dan industri lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sedangkan pada sektor lainnya dan pertanian persentase laki-laki lebih tinggi disebabkan jenis pekerjaan pada sektor ini membutuhkan kekuatan fisik.

Penyerapan tenaga kerja yang mengalami penurunan yaitu pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan, dan sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel dari 16,79 persen, 24,06 persen dan 20,57 persen di tahun 2017 menjadi 16,46 persen, 23,80 persen, dan 18,43 persen di tahun 2018. Hal ini terkait dengan lesunya penjualan barang konsumsi, melemahnya daya beli masyarakat sehingga banyak pedagang dan toko retail yang tutup. Sedangkan lapangan usaha yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota

Sawahlunto adalah sektor lainnya dari 26,39 persen menjadi 27,37 persen di tahun 2018 begitu juga dengan sektor industri pengolahan meningkat dari 12,20 persen di tahun 2017 menjadi 13,94 persen di tahun 2018.

**Gambar 4.1 Persentase penduduk 15 tahun ke atas Menurut Lapangan Usaha, 2017-2018**

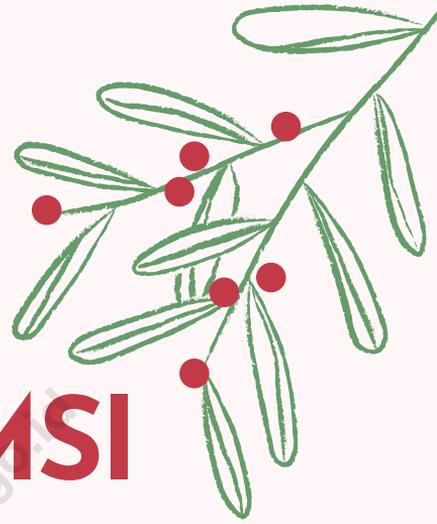


**Kode lapangan Usaha**

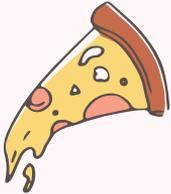
1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan/ *Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery*
2. Industri Pengolahan/ *Manufacturing Industry*
3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel/ *Wholesale Trade, Retail Trade, Restaurant and Hotel*
4. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan/ *Community, Social and Personal Services*
5. Lainnya/*Others* (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air, Bangunan, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi, Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/ *Mining and Quarrying, Electricity, Gas and Water, Construction, Transportation, Storage and Communication, Financing, Insurance, Real Estate and Business Services*)

Bab 5

# TARAF DAN POLA KONSUMSI



## PENGELUARAN RATA-RATA PERKAPITA/BULAN



**MAKANAN**

**Rp622.656,- (52,88%)**



**BUKAN MAKANAN**

**Rp554.878,- (47,12%)**





## TARAF DAN POLA KONSUMSI

### Pengeluaran Rumah Tangga

Pola konsumsi penduduk juga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat. Budaya dan perilaku lingkungan akan membentuk pola kebiasaan tertentu pada kelompok masyarakat. Data pengeluaran dapat mengungkapkan pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan non makanan. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan terjadi pergeseran pola pengeluaran, yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Hal ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, begitupula sebaliknya permintaan akan barang bukan makanan pada umumnya meningkat atau tinggi.

Dari segi budaya, pergeseran ini dikhawatirkan menjadi pertanda bahwa masyarakat semakin menyukai hal-hal yang bersifat instan dan praktis. Selain itu, dari segi keamanan pangan, ada beberapa isu yang harus menjadi perhatian. Makanan jadi banyak digemari karena kepraktisannya. Namun di sisi lain teknologi pangan akan menyebabkan semakin tumbuhnya kekhawatiran akan tingginya resiko tidak aman bagi makanan yang dikonsumsi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan rakyat. Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan pendapatan penduduk yang meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin memberi indikasi menurunnya pendapatan penduduk.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri.

**Tabel 5.1 Perkembangan Pengeluaran Rata-rata Perkapita/Bulan, 2017-2018**

Jenis Pengeluaran	Nominal (Rp)		(%)	
	2017	2018	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Makanan</b>	<b>604 262</b>	<b>622 656</b>	<b>54,25</b>	<b>52,88</b>
<b>Bukan Makanan</b>	<b>509 574</b>	<b>554 878</b>	<b>45,75</b>	<b>47,12</b>
Perumahan	217 546	256 453	19,53	21,78
Barang dan Jasa	108 772	120 923	9,77	10,27
Pakaian	43 318	52 350	3,89	4,45
Barang Tahan Lama	100 181	81 011	8,99	6,88
Lainnya	39 758	44 141	3,57	3,75
<b>Jumlah</b>	<b>1 113 836</b>	<b>1 177 534</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas, 2017-2018

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2017-2018 penduduk meningkat dari Rp 1.113.836,- menjadi Rp. 1.177.534,-. Persentase pengeluaran untuk makanan memperlihatkan adanya penurunan yaitu dari 54,25 persen menjadi 52,88 persen pada tahun 2018. Dan sebaliknya persentase untuk pengeluaran

bukan makanan meningkat dari 45,75 persen pada tahun 2017 menjadi 47,12 persen di tahun 2018. Ini mengindikasikan pengeluaran bukan makanan menjadi prioritas. Penurunan pengeluaran pada kelompok bukan makanan terjadi peningkatan pada semua jenis pengeluaran, kecuali pengeluaran barang tahan lama yang justru mengalami penurunan dari 8,99 persen meningkat menjadi 6,88 persen pada tahun 2018.

Untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan penduduk digunakan kriteria ketimpangan dari Bank Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh kelompok 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Disamping kriteria yang ditetapkan Bank Dunia ada indikator lain yang juga sering digunakan yaitu Indeks Rasio.

**Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran untuk Makanan dan Non Makanan Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita (Rupiah), 2018**

<b>Golongan Pengeluaran</b>	<b>Makanan</b>	<b>Non Makanan</b>
(1)	(2)	(3)
40 % Terendah	398 947	234 863
40 % Menengah	662 641	468 818
20 % Tertinggi	990 506	1 366 687

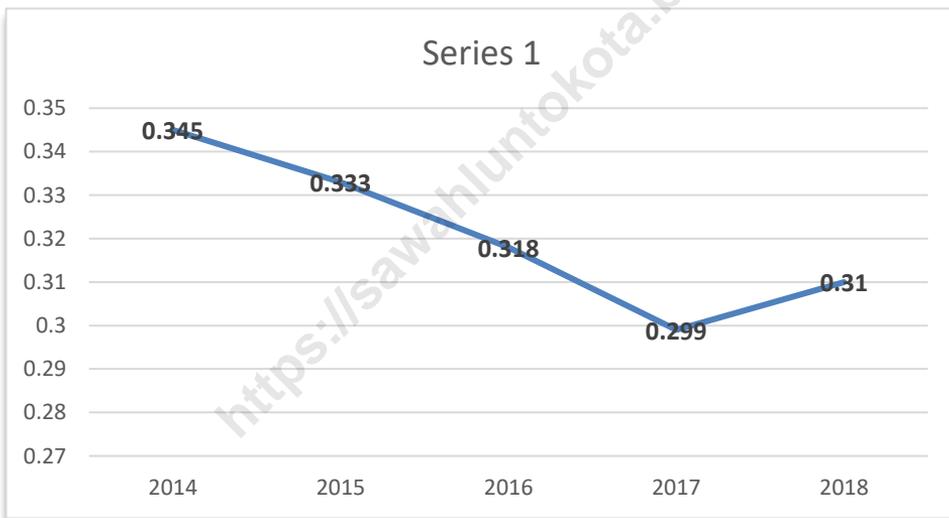
*Sumber: Susenas, 2018*

Berdasarkan kriteria Bank Dunia, pada tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan non makanan untuk golongan pengeluaran menengah kebawah. Sementara pada kelompok penduduk berpendapatan tinggi terlihat rata-rata

pengeluaran untuk makanan lebih rendah dibandingkan pengeluaran untuk non makanan.

Sementara itu untuk koefisien indeks gini, tidak menunjukkan perubahan, meskipun pendapatan penduduk cenderung naik turun, namun indeks gini tetap berapa pada kisaran 0,29 hingga 0,35 dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 0,31 bila dibandingkan tahun 2017 yaitu 0,299 yang menunjukkan ketimpangan antar kelompok semakin besar.

**Gambar 5.1 Indeks Gini Ratio Kota Sawahlunto, 2014-2018**



Sumber: Susenas, 2018

### Konsumsi Energi dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap

makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2013 (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2012), rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia masing-masing sebesar 2150 kkal dan 57 gram protein.

**Tabel 5.3 Konsumsi Energi dan Protein per Kapita per Hari menurut Golongan Pengeluaran, 2018**

<b>Golongan Pengeluaran</b>	<b>40% Terendah</b>	<b>40% Menengah</b>	<b>20% Tertinggi</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Energi (kkal)	1 681,68	2 153,95	2 545,75
Protein (gram)	51,96	62,37	79,36

*Sumber: Susenas 2015-2017*

Rata-rata konsumsi kalori penduduk Kota Sawahlunto golongan pengeluaran terendah kurang dalam memenuhi untuk konsumsi kalori dan protein, hal ini terlihat di tabel 5.3 konsumsi kalori sebesar 1.681,68 kkal dan konsumsi protein sebesar 51,96 gram. Hal ini berarti konsumsi kalori per hari penduduk untuk pengeluaran terendah belum memenuhi syarat kecukupan gizi berdasarkan Widya Karya Pangan. Seperti halnya konsumsi kalori, rata-rata konsumsi protein per kapita juga kurang memenuhi protein yang dikonsumsi penduduk yang berpengeluaran terendah.



## Bab 6

# PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN



**LANTAI BUKAN TANAH = 99,73%**  
**ATAP LAYAK = 100%**  
**DINDING PERMANEN = 96,84%**  
**LUAS LANTAI >10% PERKAPITA = 80,07%**





## PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Selain itu, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal memengaruhi status kesehatan penghuninya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan itu sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

### **Kualitas Rumah Tinggal**

Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, lantai dan dinding terluas yang

digunakan, termasuk fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan. Rumah tinggal dikategorikan sebagai rumah layak huni apabila sudah memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tinggal tersebut.

**Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Perumahan Kota Sawahlunto, 2017-2018**

Indikator Perumahan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Lantai Bukan Tanah	99,53	99,73
Atap layak *)	100,00	100,00
Dinding Permanen **)	99,35	96,84
Luas lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ perkapita	77,96	80,07

Sumber: Susenas, 2017-2018

\* Atap Layak: Atap Seng, Beton, Geteng, Sirap, dan Asbes

\*\* Dinding Permanen: Dinding Tembok dan Kayu

Berdasarkan Susenas 2017 dan 2018, persentase rumah tangga yang berlantai bukan tanah mencapai 100 persen, artinya hampir tidak ditemukan rumah berlantai tanah di Kota Sawahlunto. Kondisi yang sama juga terjadi pada bangunan rumah tangga yang menggunakan atap terluas. Dari hasil Susenas 2017-2018 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, sirap, seng dan asbes juga sudah mencapai 100 persen yaitu hampir juga tidak ditemukan rumah dengan atap jerami/ijuk di Kota Sawahlunto. Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah dinding terluas. Rumah tinggal dengan dinding terluas tembok dan kayu di Kota Sawahlunto juga sudah mendekati 100 persen, atau rumah tinggal yang

menggunakan dinding terluas bambu tidak mencapai 4 persen pada tahun 2018, hal ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m<sup>2</sup>. Sedangkan menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian dan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m<sup>2</sup> dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m<sup>2</sup> (BPS, 2001).

Berdasarkan hasil Susenas 2017-2018 persentase rumah tangga dengan luas lantai perkapita di atas 10 m<sup>2</sup> pada tahun 2017 mencapai 77,96 persen dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 80,07 persen.

### **Fasilitas Rumah Tinggal**

Kualitas kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah tinggal, seperti tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2018 telah mencapai 89,39 persen. Gaya hidup penduduk

dalam mengkonsumsi air minum juga telah banyak berubah. Dari tabel terlihat rumah tangga di Kota Sawahlunto yang mengkonsumsi air kemasan, air isi ulang dan ledeng mencapai 76,45 persen di tahun 2017 dan menurun menjadi 73,28 persen di tahun 2018.

**Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan Kota Sawahlunto, 2017-2018**

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Air kemasan, air isi ulang dan ledeng	76,45	73,28
Air minum bersih	92,07	89,39
Jamban sendiri	85,53	89,62
Jamban sendiri dengan tangki septik	87,30	88,77
Sumber penerangan listrik	98,78	99,11

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting perannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Pada tahun 2018, rumah tangga yang menggunakan jamban dengan tangki septik sudah mencapai 88,77 persen atau mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2017 (87,30 persen).

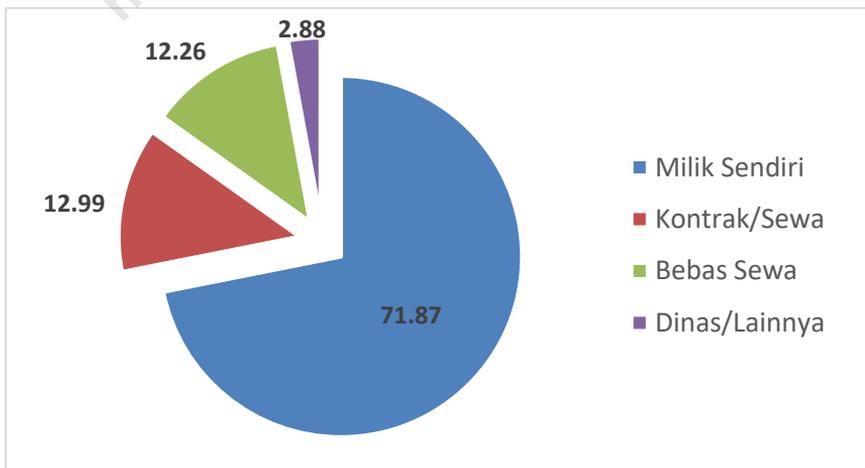
Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non

PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Di Kota Sawahlunto rumah tangga yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik dalam dua tahun terakhir sudah hampir mencapai 100 persen yaitu 98,78 persen di tahun 2017 dan 99,11 persen di tahun 2018.

### Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah tinggal merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status rumah kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

**Gambar 6.1 Status Kepemilikan Rumah (Persen), 2018**



Sumber: Susenas 2018

Berdasarkan hasil Susenas 2018, rumah tangga di Kota Sawahlunto yang menempati rumah milik sendiri hanya sebesar 71,87 persen, kemudian sebanyak 12,99 persen adalah rumah kontrak/sewa. Rumah tangga yang menempati rumah bebas sewa di Kota Sawahlunto yaitu 12,26 persen. Cukup tingginya rumah kontrak/sewa dan rumah bebas sewa dimungkinkan karena harga jual tanah di Kota Sawahlunto cukup tinggi, sehingga penduduk banyak yang mengontrak, sewa atau menempati rumah milik orang tua/saudara.

<https://sawahluntokota.bps.go.id>

Bab 7

# KEMISKINAN

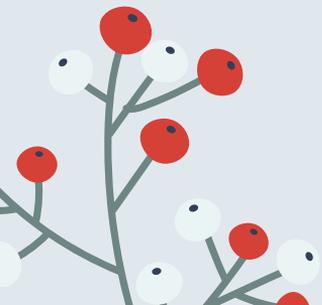


**JUMLAH PENDUDUK MISKIN  
1,48 RIBU JIWA (2,39%)**

**GARIS KEMISKINAN = Rp354.665,-**

**INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) = 0,27**

**INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) = 0,07**





## KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok bangsa Indonesia yang selalu menjadi prioritas pemerintah dan menjadi agenda rutin dalam Rencana Pembangunan Nasional . Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Angka kemiskinan yang cenderung menurun secara melambat selama beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa strategi penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah belum optimal. Hal ini tergambar dari belum meratanya pembangunan antar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, permasalahan kemiskinan memang tidak dapat teratasi dengan mudah, karena kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang mencakup berbagai aspek kehidupan, tidak hanya mencakup sisi ekonomi, tetapi juga sisi sosial dan budaya. Saat ini pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pro-rakyat menggunakan pendekatan holistik, seperti program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan mata pencaharian. Mengentaskan kemiskinan membutuhkan bantuan dari semua pihak di Indonesia, tidak cukup hanya dari pemerintah, tetapi juga dari lembaga penelitian, sektor swasta dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (*Worldbank*).

### **Perkembangan Penduduk Miskin di Kota Sawahlunto**

Secara umum, persentase penduduk miskin terhadap jumlah seluruh penduduk Kota Sawahlunto menunjukkan tren di seputar angka 2 persen. Tingkat kenaikan kemiskinan yang mencapai 0,38 persen pada tahun 2018 adalah yang tertinggi sepanjang periode empat tahun terakhir. Berdasarkan tabel 7.1, jumlah penduduk miskin meningkat dari 1,23 ribu di tahun 2017

menjadi 1,48 ribu di tahun 2018 walaupun sempat jumlahnya tidak berubah dari 2015 sampai tahun 2016.

**Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin, 2015-2018**

Tahun	Jumlah penduduk miskin (Ribu)	Persentase penduduk miskin (%)
(1)	(2)	(3)
2015	1,34	2,22
2016	1,34	2,21
2017	1,23	2,01
2018	1,48	2,39

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Suatu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin berdasarkan Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan. Penduduk dikategorikan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah GK. Oleh karena itu, nilai GK berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada suatu waktu. Selama periode 2016-2018, Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2016 Rp318.721,- menjadi Rp337.682,- di tahun 2017 dan Rp354.665,- tahun 2018.

**Tabel 7.2 Beberapa Indikator Penduduk Miskin, 2016-2018**

Indikator	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Garis Kemiskinan (Rupiah)	318 721	337 682	354 665
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,12	0,29	0,27
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,01	0,07	0,07

Sumber: BPS Kota Sawahlunto

Selain GK, rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan perlu diperhatikan. Ukuran untuk mengukur kesenjangan pengeluaran disebut sebagai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Berdasarkan tabel 7.2, nilai P1 berfluktuatif, pada tahun 2016 dari 0,12 naik menjadi 0,29 di tahun 2016 dan pada tahun 2017 turun kembali menjadi 0,27 persen. Penurunan nilai P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Semakin kecil nilai P1 berdampak pada semakin mudah penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Ukuran lainnya untuk melihat kondisi kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama 2017-2018, nilai P2 tetap. Pada tahun 2017, nilai P2 mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu dari 0,01 menjadi 0,07 dan di tahun 2018 tetap sama yaitu 0,07. Semakin kecil nilai P2 mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.



Bali 8

# SOSIAL LAINNYA



**PERSENTASE PENDUDUK YANG  
PERNAH MENJADI KORBAN  
KEJAHATAN = 0,34%**

## PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMPUNYAI AKSES TEKNOLOGI INFORMASI



**TELEPON SELULAR  
= 72,28%**



**KOMPUTER/LAPTOP  
= 27,63%**



## SOSIAL LAINNYA

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Teknologi yang semakin canggih seolah membuat akses dunia tanpa batas. Tingkat kebutuhan mulai mengalami pergeseran, dari kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer, seperti berlibur atau berwisata, eksistensi di tengah masyarakat, dan mengakses teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi yang cepat antar daerah dan negara menjadi kebutuhan utama yang tidak terhindarkan dalam menunjang keberlangsungan hidup orang banyak.

**Tabel 8.1 Indikator Sosial Lainnya, 2017-2018**

<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
(1)	(2)	(3)
Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan	0,92	0,34
Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha	39,10	34,65
Persentase Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	1,84	2,81

*Sumber: Susenas 2016-2017*

### **Penerima Kredit Usaha**

Kredit usaha pada umumnya diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bantuan modal dan pembiayaan bagi usaha

produktif. Kredit usaha umumnya diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat (BPR), modal ventura, Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK), pegadaian, dan sebagainya. Dalam SUSENAS, kredit usaha bisa berupa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Bank selain KUR, KUBE/KUB, program koperasi, perorangan (dengan bunga), dan lainnya.

Tahun 2017, persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha cukup besar yaitu sebesar 39,10 persen kemudian menurun sedikit menjadi 34,65 persen di tahun 2018. Kredit usaha sangat bermanfaat terutama bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro dalam menopang perekonomian Kota Sawahlunto. Penurunan persentase rumah tangga yang menerima kredit usaha menggambarkan minat masyarakat semakin menurun untuk memperoleh kredit usaha, terutama dari lembaga keuangan atau bank. Masyarakat cenderung memilih pinjaman di lembaga keuangan perorangan atau bank plecit karena persyaratan pengajuan yang lebih mudah dan cepat cair.

### **Tindak Kejahatan**

Keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan rakyat. Rasa aman dari tindak kejahatan menjadi salah satu indikator pendukung yang mencerminkan rakyat sejahtera dan menjadi salah satu aspek penyusun Indeks Kebahagiaan Indonesia oleh BPS tahun 2014. Tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut

diancam hukuman penjara dan kurungan (BPS). Tindak kejahatan atau kriminalitas umumnya terjadi sebagai akibat dari kesenjangan sosial dan ekonomi suatu negara, serta bisa bersumber dari faktor politik.

Tahun 2017, persentase penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan di Kota Sawahlunto sebesar 0,92 persen. Angka ini turun menjadi 0,34 persen di tahun 2018. Jenis kejahatan yang dialami dapat berupa pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, perkosaan, dan lainnya. Penurunan jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan dapat dipandang sebagai suatu hal yang terjadi seiring dengan penurunan tindak kejahatan.

### **Akses Pada Teknologi Komunikasi dan Informasi**

Di era informasi saat ini, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur dan akses Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong pergerakan sektor ekonomi. Tantangan pembangunan dari suatu negara besar seperti Indonesia adalah penyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi. Infrastruktur membantu konektivitas antar wilayah satu dengan wilayah lain secara cepat dan luas. Di samping pembangunan secara fisik, pembangunan jalur transportasi dan TIK juga penting sebagai salah satu infrastruktur konektivitas.

Kemajuan di bidang teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Potensi TIK jika dikembangkan secara optimal dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam pembangunan nasional, TIK berperan serta menciptakan lapangan pekerjaan, memberdayakan masyarakat, dan mengembangkan kemampuan masyarakat. Semakin banyak

penduduk yang memiliki akses TIK dan terus mengikuti kemajuan teknologi, maka dapat dipastikan kesejahteraan penduduk akan semakin meningkat.

Persentase rumah tangga yang mempunyai akses teknologi informasi dan komunikasi dengan alat komunikasi telepon selular dan akses internet mengalami peningkatan pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Persentase rumah tangga yang mempunyai komputer/ laptop tahun 2018 sebesar 27,63 persen atau menurun 0,10 persen dibanding tahun 2017 (27,73 persen).

**Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi Menurut Alat Komunikasi dan Informasi, 2017-2018**

Alat Komunikasi dan Informasi	2017	2018
(1)	(2)	(3)
Telepon Selular	67,53	72,28
Komputer/laptop	27,73	27,63
Akses Internet	34,11	40,72

*Sumber: Susenas 2017-2018*

Persentase penduduk yang mengakses internet meningkat dari 34,11 persen di tahun 2017 menjadi 40,72 persen di tahun 2018. Persentase penduduk yang mempunyai akses telepon seluler tahun 2018 sebesar 72,28 persen atau meningkat 4,75 persen dibanding tahun 2017. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan masyarakat saat ini terhadap telepon seluler semakin meningkat karena kemudahan mobilitas. Seiring perkembangan arus informasi yang mengalir deras, masyarakat juga semakin membutuhkan media atau sarana yang dapat menunjang aktivitasnya sehari-

hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Oleh sebab itu, para vendor telepon seluler berlomba-lomba menguasai pangsa pasar dengan melihat antusiasme masyarakat yang cukup besar untuk memiliki telepon seluler yang sesuai dengan kebutuhannya.

<https://sawahluntokota.bps.go.id>



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://sawahluntokota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA SAWAHLUNTO**

Jalan Bagindo Aziz Chan, Sawahlunto, 27417, Telp (0754) 61049

E-mail: [bps1373@bps.go.id](mailto:bps1373@bps.go.id) ; Homepage: <http://sawahluntokota.bps.go.id>

ISBN 978-602-3394-63-2



9 786021 394632